

(Non-formal) Collaborative Governance is Possible: Studi Kasus Program Online Learning Assistance oleh Project Child Indonesia

Savira Noor Febry¹

Diserahkan: 8 September 2022 | Diterima: 28 Oktober 2023 |

Diterbitkan: 29 Desember 2023

Abstrak

Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dapat mempermudah pemerintah dalam menjalankan pemerintahan melalui collaborative governance. Kajian ini melihat terdapat kelompok masyarakat yang menjadi kolaborator non-formal dan membantu pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan. Dalam hal ini, kolaborator dan pemerintah memiliki fokus isu yang sama, yaitu learning loss di tengah pandemi Covid-19, namun tidak terikat kontrak kerja sama resmi, yang akan disebut dengan non-formal collaborative governance. Salah satu contohnya peran Project Child Indonesia (PCI) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang fokus dengan isu pendidikan di akar rumput. Kajian di sini berusaha melihat tahapan non-formal collaborative governance yang diinisiasi oleh PCI dan apa saja tantangan maupun kendala yang dihadapi. Kajian di sini menggunakan metode netnografi dengan dua sumber data, yaitu observasi daring selama satu bulan pada 12 April 2022 hingga 19 Mei 2022 dan wawancara. Sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, negara menghadapi permasalahan baru di berbagai sektor, salah satunya sektor pendidikan yang membutuhkan penyesuaian. PCI berusaha merespons kondisi ini dengan cepat tanpa melalui proses birokrasi yang panjang. PCI menerapkan program pembelajaran jarak jauh dengan kurikulum yang ditetapkan oleh

1 Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
Email: saviranoorf@gmail.com.

pemerintah serta menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat dengan melakukan survei sebelum dan sesudah program dilakukan. Tahapan yang lebih sederhana dan fleksibilitas menjadi keunggulan dari model non-formal collaborative governance.

Kata Kunci: *Non-Formal Collaborative Governance, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pendidikan*

PENDAHULUAN

“Saya melakukannya di Kemendikbud selama 2 tahun. Terlalu banyak urusan yang tidak mungkin bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah sendiri, tapi justru dapat memberikan ruang bagi semua agar terlibat. Apalagi, tidak hanya aspek pendidikan, namun aspek budaya dan aspek seni dimana ruang ekspresi kreasi itu bergerak begitu cepat dan pemerintah kalah cepat dalam mengikuti perubahan dalam aspek-aspek tersebut. Sehingga saat itu kami menyiapkan platform-nya dan membiarkan masyarakat terlibat dan kerja bersama.”

Kutipan tersebut disampaikan oleh mantan Mendikbud, Anies Baswedan dalam acara Kumpul Kreatif 03 pada Januari 2017 yang mengangkat tema “Kolaborasi Pemerintah dan Warga”. Hal ini cukup menunjukkan bahwa Anies Baswedan sebagai bagian dari pemerintah merasa terbantu atas keterlibatan masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan urusan-urusan yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah.

Sejak virus Covid-19 (*Coronavirus Disease of 2019*) masuk ke Indonesia pada Maret 2020, pemerintah mewajibkan seluruh kegiatan termasuk pendidikan dilaksanakan dari rumah sebagai langkah preventif. Peralihan dalam sektor pendidikan menjadisorotankarenaseluruhjenjangpendidikan formal harus melaksanakan kegiatan pembelajarannya dari rumah sekitar dua tahun. Para guru, siswa, dan orang tua harus bergulat menyesuaikan diri dengan kegiatan mengajar dan belajar yang sepenuhnya daring, dimana keterampilan ini masih relatif baru. Walaupun teknologi komunikasi sudah banyak mendukung pelaksanaan pendidikan, namun penggunaannya belum optimal jika dibandingkan saat Covid-19 melanda.

Mengacu pada riset SMERU (2022), masalah pendidikan yang ada di Indonesia sebelum terjadinya Covid-19 adalah terkait penurunan capaian belajar. Hal ini dibuktikan bahwa hasil belajar anak di Indonesia pada tahun 2014 jauh lebih rendah daripada tahun 2000. Karenanya sektor pendidikan telah mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah melalui upaya mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. Dilansir dari laman resmi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), negara memiliki visi untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh siswa dengan

Sustainable Development Goals ke empat hingga tahun 2030 berdasarkan arahan dari Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan memacu peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia.

Upaya-upaya ini termasuk meningkatkan kualitas dan mempermudah akses pendidikan dini sehingga anak-anak lebih siap untuk menempuh pendidikan dasar, mengadakan pendidikan dasar dan menengah yang gratis serta berkualitas, menjamin akses perguruan tinggi yang mudah, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dengan keterampilan yang relevan untuk bekerja dan berwirausaha, menjamin akses dalam pendidikan yang sama untuk semua gender dan masyarakat rentan, hingga meningkatkan pasokan guru yang berkualitas. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia telah dapat dilihat dari perencanaan pendidikan jangka panjang melalui Bappenas namun kemudian hadir pandemi Covid-19 di Indonesia yang kemudian menjadi tantangan baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENJAGA KUALITAS PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Sebagai negara yang menggunakan ide institusionalisme, upaya pemerintah dalam memperbaiki dan menjaga kualitas pendidikan dilakukan secara terpusat pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) menjelaskan bahwa ada setidaknya tiga fokus prioritas pendidikan dasar, yaitu literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Dalam melengkapi fokus prioritas ini, Kemendikbudristek menerbitkan penyederhanaan kurikulum agar mempermudah kegiatan belajar mengajar (Putra, 2020).

Selain menyederhanakan kurikulum, Kemendikbudristek melakukan terobosan baru dalam pendidikan, yaitu dengan menciptakan program Merdeka Belajar dengan menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), mengganti Ujian Nasional (UN), menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta mengatur ulang sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Kemendikbudristek, 2021). Kemendikbudristek dalam hal ini merupakan

pemilik kekuasaan tertinggi dalam mengatur pendidikan di Indonesia, meski demikian kualitas pendidikan tidak serta-merta dapat meningkat melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

Dalam pembelajaran daring, Febbi Meidawati peneliti *dari Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS)* melakukan penelitian terhadap kualitas pendidikan selama diterapkannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Survei ini menemukan bahwa faktor yang paling memengaruhi capaian belajar peserta didik adalah kemampuan mengajar guru dalam sistem daring dan keterlibatan orang tua dalam mendampingi pembelajaran dari rumah (Larasati, 2021).

Dengan demikian, berbagai upaya pemerintah dalam memperbaiki dan menjaga kualitas pendidikan di Indonesia selama pandemi Covid-19 yang lebih menekankan pada penyederhanaan birokrasi pendidikan ini masih terbatas dalam ranah regulasi dan pemerintah belum memiliki kapasitas untuk melakukan pengelolaan guru-guru di sekolah sehingga belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan *learning loss*. Menurut survei yang dilakukan oleh *Project Child Indonesia (PCI)* sebelum program *Online Learning Assistance (OLA)* periode semester Genap 2021/2022 menyatakan bahwa justru kesulitan saat pelaksanaan kelas daring adalah 35% peserta didik merasa kesulitan dalam

memahami penjelasan guru di kelas, 31% peserta didik merasa terkendala dalam teknis, dan sisanya peserta didik tidak mengikuti sekolah daring. Hal ini akhirnya memicu gerakan sosial dari masyarakat sipil yang merupakan seperangkat nilai-nilai ideal dan normatif juga merupakan aktivitas kelompok warga dalam bentuk lembaga formal, komunitas non-formal, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam mengatasi dinamika *learning loss* yang terjadi di akar rumput, Kajian ini menggunakan kasus PCI dan berusaha melihat bagaimana peran LSM dalam membantu pemerintah di masa pembelajaran jarak jauh. Mengingat PCI melakukan program pemberdayaan tanpa adanya kontrak kerja resmi dengan pemerintah, Kajian ini hendak melihat bagaimana dinamika kolaborasi non-formal antara lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi tantangan penyesuaian kegiatan belajar mengajar.

KAJIAN LITERATUR

Tulisan ini menemukan topik besar penelitian seputar *collaborative governance* dan peran LSM dalam sektor pendidikan. *Pertama*, penelitian tentang *collaborative governance* di Indonesia, Arrozaaq (2016) meneliti tentang kolaborasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*)

dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa dalam kolaborasi ini sudah memiliki penggerak prinsip bersama, motivasi bersama, kapasitas kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak sementara dan adaptasi tindakan kolaborasi. Namun, masih ditemukan pula beberapa kendala, antara lain kelompok-kelompok usaha kesulitan mendapatkan izin usaha secara legal sehingga menghadapi kesulitan untuk mendapatkan bantuan dana dan ikut dalam kolaborasi. Selain itu, tidak ada fasilitator dalam hal pemasaran oleh pemerintah, kontinuitas kolaborasi masih sangat kurang, serta kurang terlibatnya pihak swasta sehingga terdapat kesulitan dalam proses evaluasi pada masing-masing instansi yang terlibat.

Penelitian lain dilakukan oleh Tilano dan Suwitri (2012) tentang bentuk *collaborative governance* dalam upaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kota Semarang yang dalam kolaborasi ini ditemukan adanya pembentukan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Forum LLAJ) Kota Semarang dengan Dinas Perhubungan sebagai *leading manager*. Penelitian ini menemukan bahwa proses kolaborasi sudah berjalan dengan baik di dalam forum namun pelaksanaan forum dilakukan secara situasional dan tidak memiliki patokan setiap tahunnya harus menyelenggarakan

forum yang mengakibatkan pemberdayaan dalam kolaborasi tidak maksimal. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi dalam forum justru lebih sering dilakukan secara tidak formal melalui grup *WhatsApp*.

Walaupun *collaborative governance* telah mulai diinisiasi untuk mengatasi beberapa masalah sosial, terdapat pemerintah daerah yang belum memanfaatkan jejaring dengan masyarakat. Penelitian Rupita (2021) menunjukkan bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh belum maksimal bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang merupakan masyarakat dengan kerentanan berlapis dan belum ditemukan adanya kolaborasi dengan masyarakat. Artinya, pemerintah daerah masih memegang kendali sendiri dalam menjalankan kebijakan di wilayah ini dan hal ini dinilai tidak efektif di lapangan. Penelitian ini membuktikan jika terdapat bagian kosong yang tidak bisa dipegang oleh pemerintah di lapangan dan di luar penetapan kebijakan sehingga Rupita menyarankan agar pemerintah melakukan *collaborative governance* dimana masyarakat sipil dapat berkontribusi untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang belum tertangani oleh pemerintah daerah.

Pada ranah kedua, penelitian tentang percobaan pelaksanaan pendampingan belajar daring di Desa Cibunar (Fitriani 2021). Penelitian ini berusaha melakukan sebuah

pendampingan mandiri dengan dasar melihat permasalahan siswa dan guru dalam mengoperasikan perangkat untuk mengikuti kelas daring serta kajian ini berusaha membuat program dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Belum terlihat adanya kolaborasi tatap muka antara pemerintah dan masyarakat serta pendanaan dalam pelaksanaan program, tetapi pelaksanaan ini bekerja sama dengan institusi pemerintahan daerah, yaitu sekolah terkait.

Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kajian yang menemukan bahwa terdapat bagian-bagian kosong yang belum dipenuhi oleh pemerintah, baik sebagai pelaku primer maupun pelaksanaan kolaborasi serta dalam pelaksanaan kolaborasi pun masyarakat masih menemukan berbagai hambatan. Dapat dilihat pula bahwa terdapat beberapa kelompok masyarakat yang turun langsung ke lapangan untuk merespons kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan berhasil mendukung kebijakan pemerintah di akar rumput tanpa harus melewati tahapan-tahapan *collaborative governance* secara formal. Penulis menyebut fenomena ini sebagai “kolaborator non-formal” yang bekerja merespons dinamika sosial di akar rumput yang tidak dan/atau belum dapat dipenuhi oleh pemerintah dan topik penelitian ini kemudian dapat dikembangkan untuk penelitian lebih

lanjut tentang studi non-formal *collaborative governance*. Mekanisme non-formal *collaborative governance* belum banyak diulas dapat studi akademik, dimana penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DAN PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

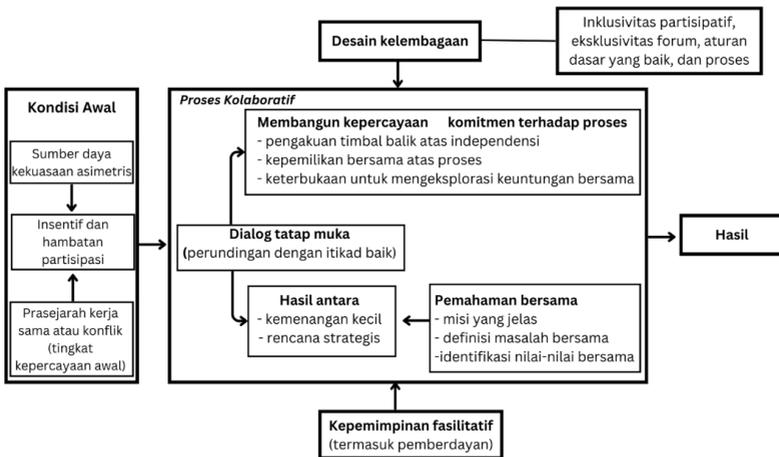
Sejauh yang dapat ditemukan oleh peneliti, teori yang ada membahas *collaborative governance* secara formal, seperti diulas di bawah ini. Temuan penelitian akan melengkapi teori ini dari perspektif non-formal.

COLLABORATIVE GOVERNANCE

Menurut Ansell & Gash (2007), *collaborative governance* merupakan pemerintahan yang terdapat satu atau lebih *stakeholder* non-pemerintahan yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang formal, berdasarkan konsensus, dan bersifat penasihat. Pemerintahan kolaboratif timbul akibat respons masyarakat terhadap implementasi kebijakan di hilir dan tingginya biaya regulasi.

Terdapat enam kriteria penting pada definisi ini, yaitu (1) forum yang diinisiasi oleh badan-badan publik atau lembaga, (2) partisipan forum termasuk aktor non-negara, (3) partisipan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan

dan tidak hanya “berkonsultasi” dengan pemerintah, (4) forum diselenggarakan secara formal dan terdapat pertemuan kolektif, (5) forum bertujuan untuk mengambil keputusan melalui konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik), dan (6) kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik. Dalam menjelaskan proses kolaborasi, Ansell & Gash (2007) membuat model *collaborative governance* dengan tiga komponen penting, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, serta kepemimpinan fasilitatif.



Sumber: Ansell & Gash, 2007

Seperti ditunjukkan pada tabel di atas, pada kondisi awal (*starting condition*) menjelaskan adanya kondisi pendukung maupun hambatan untuk mendorong dan memicu kegiatan

kolaborasi. Desain kelembagaan menjelaskan adanya peran masing-masing lembaga, transparansi, partisipasi, serta aturan kolaborasi. Dalam merumuskan insentif-insentif serta desain kelembagaan yang menarik diperlukan kepemimpinan yang mampu memfasilitasi kolaborasi dan memberdayakan segenap pihak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Untuk proses kolaborasi, Ansell & Gash (2007) menjelaskan adanya dialog tatap muka untuk mencapai konsensus, pembangunan kepercayaan untuk menjadi landasan dalam mencapai tujuan kolaborasi dan menciptakan komitmen dalam proses, kemudian dalam proses kolaborasi antar aktor harus mengembangkan pemahaman yang sama terkait hal-hal yang akan dicapai secara kolektif yang kemudian akan menciptakan luaran kolaborasi.

Hal yang berbeda kemudian ditemukan dalam kolaborasi non-formal yang banyak dilakukan oleh berbagai pihak di luar pemerintah, salah satunya PCI sebagai LSM yang peduli akan pendidikan. Sebelumnya, mari kita membahas terlebih dahulu tentang LSM dalam melakukan pemberdayaan.

LSM SEBAGAI BAGIAN DARI MASYARAKAT SIPIL

Perlu dipahami bahwa masyarakat sipil merupakan entitas non-militer pada suatu negara. Masyarakat sipil dapat dilihat menjadi beberapa pengertian, antara lain masyarakat sipil sebagai organisasi atau LSM, masyarakat sipil sebagai *value* atau norma, dan masyarakat sipil sebagai ruang antara negara dan masyarakat. Masyarakat sipil juga memiliki beragam arena seperti arena format LSM; gerakan populer seperti petani, buruh, dan nelayan; gerakan berbasis isu seperti gerakan anti korupsi, gerakan anti plastik; gerakan berbasis kebudayaan atau agama; serta gerakan berbasis sektor grup seperti gerakan pemuda, perempuan, etnis, dan lain sebagainya. Masyarakat sipil memiliki beberapa ciri utama, antara lain terbuka, independen, sukarela, bergantung pada diri sendiri, serta mengikuti aturan hukum. Terdapat pula berbagai hal yang dapat menggerakkan suatu masyarakat sipil, antara lain adanya isu yang dibawa, konteks isu yang sedang diperjuangkan, politik, target, serta strategi yang digunakan untuk mencapai target yang ingin dicapai. Salah satu arena masyarakat sipil adalah LSM.

Menurut Budiarto (2008), secara historis di Indonesia LSM sudah ada sejak awal abad ke-20, dalam konteks yang waktu itu, umumnya LSM lahir sebagai cerminan dari kepedulian golongan masyarakat tingkat menengah terhadap kasus kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang orientasi, LSM di Indonesia dapat dibagi dalam lima kelompok paradigma, yaitu *pertama*, LSM penganut paradigma kesejahteraan yang melihat bahwa penyebab dari kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat adalah suatu kekuatan yang tidak dalam kendali manusia, seperti takdir dan bencana alam. LSM dengan ini memiliki tujuan untuk menolong mengurangi penderitaan yang dirasakan mereka dalam bentuk derma, santunan, atau sedekah. *Kedua*, LSM penganut paradigma modernisasi yang melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, penghasilan, hingga kesehatan terutama gizi sehingga kegiatan yang dilakukan oleh LSM berparadigma modernisasi ditujukan untuk memperbanyak prasarana, misalnya dengan membangun sekolah atau klinik kesehatan atau meningkatkan pendapatan dengan cara menyediakan modal.

Ketiga, LSM dengan paradigma reformasi. LSM ini melihat bahwa sumber dari berbagai masalah sosial adalah lemahnya pendidikan, korupsi, manajemen yang buruk serta inefisiensi. LSM ini memiliki aktivitas-aktivitas untuk memperbanyak tenaga profesional, perbaikan peraturan dan perundang-undangan, hingga pemberlakuan sanksi yang berat bagi pelanggar hukum. **Keempat**, LSM dengan paradigma liberasi atau pembebasan. LSM ini melihat bahwa penyebab segala keterbelakangan masyarakat merupakan bentuk penindasan sehingga bentuk kegiatan yang dilakukan biasanya berbentuk pendidikan politik, mobilisasi aksi, perekrutan dan pendidikan kader, hingga kampanye pembentukan opini publik. **Kelima**, LSM dengan paradigma transformasi. LSM ini melihat bahwa sumber keterbelakangan adalah ketidakadilan tatanan sosial, ekonomi, dan politik sehingga mereka menginginkan untuk membentuk suatu tatanan baru yang lebih adil. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LSM dengan paradigma ini adalah penyadaran politik, mobilisasi aksi, pengorganisasian rakyat, serta membangun jaringan advokasi. Kajian ini akan menggali salah satu kelompok masyarakat sipil yang terpicu oleh fenomena ini, yaitu PCI (salah satu LSM).

Dalam hal ini, PCI melihat isu di masyarakat tentang masalah pendidikan, khususnya masalah *learning loss* yang masih eksis di Indonesia dan telah berupaya dalam membantu pemerintah dalam mengurangi permasalahan ini di akar rumput, khususnya pada saat adanya Covid-19 melalui program OLA.

Oleh karena itu, non-formal *collaborative governance* memiliki beberapa perbedaan dalam model pemberdayaannya, yaitu dalam non-formal *collaborative governance* sistem pemberdayaannya jauh lebih sederhana karena terdapat beberapa aspek dalam *collaborative governance* yang tidak dapat ditemui dalam formal *collaborative governance*, seperti adanya pemberian insentif, dialog tatap muka, dan kepemimpinan fasilitatif karena kegiatan ini hanya dilakukan oleh suatu lembaga atau masyarakat dalam merespons pemerintah namun kedua pihak sama-sama memiliki suatu isu yang diangkat bersama. Contohnya, PCI bergerak dalam bidang pendidikan dengan memberdayakan anak-anak di tingkat akar rumput dalam masa penyesuaian masa pandemi Covid-19 dan pemerintah juga memiliki kepedulian dalam isu yang sama, yaitu

penyesuaian pembelajaran masa pandemi Covid-19 dengan menetapkan kebijakan. Kedua aktor ini tidak dapat saling bertukar peran namun dapat berkolaborasi secara tidak langsung atau non-formal.

SISTEM PEMBERDAYAAN *TOP-DOWN* DAN *BOTTOM-UP*

Sistem pemberdayaan masyarakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem *top-down* dan *bottom-up*. **Pertama**, sistem *top-down*, yaitu sistem pemberdayaan dimana model perencanaannya bersifat teknokratik yang pembuatannya terpusat oleh para perencana profesional, yang kerap kali merupakan aparat pemerintahan. Dalam sistem ini, perencanaan banyak didasarkan pada asumsi-asumsi yang ada di atas meja bukan berdasarkan realita lapangan. Sistem ini juga rentan untuk mendapatkan intervensi kepentingan dari pemerintahan yang berkuasa. Model ini tidak jarang menyediakan instrumen untuk perencanaan dari bawah namun instrumen ini hanya bersifat prosedural bukan substansial dan hanya digunakan untuk sarana meningkatkan legitimasi bahwa pemerintah telah memberi perhatian kepada aspirasi dari bawah. **Kedua**, sistem *bottom-up* yaitu

sistem pemberdayaan yang model perencanaannya bersifat partisipatif. Isu yang dibawa adalah isu yang benar-benar terjadi di masyarakat dan isu yang diangkat oleh masyarakat itu sendiri (Soetomo, 2018).

PCI merupakan salah satu lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dengan sistem *bottom-up*, dimana pemberdayaan dilakukan berdasarkan realita kebutuhan masyarakat di lapangan, yaitu rendahnya kualitas pendidikan yang dirasa semakin berat akibat terjadinya pandemi Covid-19. Program pemberdayaan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Upaya pemberdayaan dalam sektor pendidikan pada masa Covid-19 di Indonesia sudah dilakukan dalam dua sistem, baik *top-down* maupun *bottom-up*. Sistem *top-down* melihat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah melalui institusi yang memiliki wewenang dalam pembuatan peraturan, seperti Kemendikbud dan Kemensos serta pembuatan perencanaan kebijakan jangka panjang melalui Bappenas. Sistem *bottom-up* juga melakukan pemberdayaan yang sama yang dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh PCI dalam mendampingi pendidikan pada masa Covid-19 melalui pengadaan program OLA.

METODE PENELITIAN DAN PENGAMBILAN DATA

Kajian ini menggunakan metode netnografi yang menurut Kozinets (2010), metode yang melihat bahwa di dalam ruang internet terdapat masyarakat dan budayanya sendiri sehingga metode peneliti turut berpartisipasi secara virtual dalam penelitiannya. Data yang diambil dalam kajian ini berasal dari dua sumber, yaitu observasi secara daring yang dilaksanakan selama satu bulan dengan mengikuti program OLA serta wawancara dengan pengurus program, yaitu *Partnership and Marketing Manager, Program Manager, dan Program Coordinator Intern* dari PCI. Wawancara mendalam juga dilakukan dengan beberapa sukarelawan, peserta didik terdaftar, dan orang tua.

Observasi daring telah dilakukan selama lima minggu sejak tanggal 12 April 2022 hingga 19 Mei 2022 dan wawancara daring atau melalui telepon telah dilakukan sejak April 2022 hingga Juni 2022. Kajian ini menemukan adanya upaya pengembangan relawan pengajar serta upaya pengadaan pendidikan daring luar sekolah di masa pandemi Covid-19 dengan langkah nyata, yaitu mengadakan kerja sama dengan 17 sekolah binaan untuk pelaksanaan program OLA.

Wawancara dengan pengurus program juga telah dilakukan pada bulan Maret 2022 hingga bulan Agustus melalui telepon langsung dan pesan *Whatsapp* dengan pengurus program, yaitu *Partnership and Marketing Manager*, *Program Manager*, dan *Program Coordinator Intern* dari PCI, terkait program juga dilakukan untuk klarifikasi mengenai detail program yang belum tertulis jelas dalam situs resmi PCI dan profil LSM yang telah diberikan oleh PCI.

MENGENAL PROJECT CHILD INDONESIA

PCI merupakan salah satu bentuk dari LSM yang bergerak dalam lingkup akar rumput. Dilansir dari laman resmi PCI dan berdasarkan wawancara dengan pengurus-pengurus program, diketahui bahwa PCI mulai ada sejak tahun 2011, dimana pendirinya yang bernama Surayah Ryha dan Marvin Kiefer ingin berkontribusi dalam pengembangan komunitas masyarakat sekitar.

Sebagai LSM yang mengawali kegiatannya berdasarkan paradigma modernisasi untuk meningkatkan infrastruktur dan kapasitas masyarakat menjadi sentral dalam upaya pengentasan kemiskinan, mereka mengawali program ini dengan membuat workshop menjahit bagi para ibu setempat dengan tujuan mencapai *sustainable fashion* di Kricak Kidul yang tercatat sebagai salah satu daerah dengan angka sosial-

ekonomi terendah di Kota Yogyakarta. Saat melakukan kegiatan workshop menjahit, mereka ditemani oleh anak-anak mereka yang ingin tahu apa kegiatan yang sedang dilakukan oleh para ibu setempat hingga suatu saat seorang anak meminta Marvin yang berasal dari luar Indonesia untuk mengajar bahasa Inggris hingga kemudian pembelajaran bahasa Inggris menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap minggu bersama anak-anak di Kricak Kidul. Kegiatan ini kemudian berkembang hingga PCI kini memiliki empat program hasil dari pengembangan pembelajaran bahasa Inggris, yaitu program Sekolah Sungai, Sekolah Pantai, *Drinking Water Program*, dan *Internet Literacy Program*. PCI berkembang sebagai LSM yang sah sejak tahun 2014 dengan mencatatkan diri di Kementerian Hukum dan HAM.

Menggunakan kategorisasi Budiarto (2008), PCI menganut paradigma ketiga—dimana LSM ini ingin memperbaiki kondisi masyarakat sejak dini dengan memperbaiki pendidikan, khususnya pada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. LSM ini menyadari adanya sebuah kondisi dalam masyarakat dengan permasalahan mendasar yang belum sepenuhnya terpecahkan oleh negara serta kondisi ini dapat diselesaikan oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama dan tergabung dalam PCI. Dalam hal ini,

PCI melihat isu di masyarakat terdapat masalah pendidikan, khususnya masalah *learning loss* yang masih eksis di Indonesia dan telah berupaya dalam membantu pemerintah dalam mengurangi permasalahan ini di akar rumput.

Sejak hadirnya pandemi Covid-19, PCI menambahkan programnya, yaitu OLA guna membantu anak-anak dalam belajar secara daring untuk siswa-siswa dengan kriteria tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Program Manager PCI, program ini dilaksanakan agar anak-anak dapat belajar secara lebih maksimal saat pembelajaran di rumah. Materi yang disajikan oleh PCI, antara lain Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, serta Kebudayaan. PCI memiliki visi untuk mempersiapkan anak-anak di Indonesia dalam belajar, memulai awal hidup yang sehat, dan merasa aman serta merasa didukung dalam lingkungan yang sehat untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana alam. PCI selama ini mendampingi masyarakat kelas menengah ke bawah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pacitan.

Selain bergerak untuk komunitas dalam pembelajaran pada anak, PCI juga melakukan pemberdayaan pada para remaja dalam bentuk kegiatan sukarela yang ditargetkan untuk para remaja yang telah mendapatkan pembelajaran yang cukup untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada anak-anak sasaran PCI. Program ini diharapkan

dapat menjadi wadah pengembangan diri bagi para sukarela agar dapat memberikan dampak positif pada masyarakat secara berkelanjutan. Program ini dibuka setiap enam bulan dengan komposisi sukarelawan yang terus berganti setiap periodenya dan selain mendapatkan pengalaman, para sukarelawan juga mendapatkan sertifikat dan surat rekomendasi dari LSM sebagai bukti tertulis jika individu tersebut telah mengikuti kegiatan sukarela. Hal ini dapat membantu kelangngan lembaga ini karena lembaga ini memiliki hubungan dengan orang banyak dengan ruang lingkup yang lebih luas pula. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kemiskinan dan pendidikan yang berada di sekitar mereka.

PCI memproyeksikan diri untuk menjadi bentuk pendorong kemajuan baru bagi anak-anak bangsa yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan merupakan upaya untuk membangun kembali edukasi karena LSM ini juga menyadari bahwa *learning loss* di Indonesia bukanlah merupakan hal baru melainkan hal yang sudah lama ada di Indonesia. Selain itu, dengan banyaknya anggota yang turut terjun ke lapangan bersama PCI dapat digambarkan bahwa PCI dapat menjadi stimulan bagi masyarakat sipil yang berusia muda untuk membuat suatu kegiatan dengan tujuan yang serupa. Indonesia

terbentang dari Sabang sampai Merauke yang berbentuk negara kepulauan, sangat sulit jika pemerintah sendiri yang terjun langsung memberikan fasilitas dan standar yang sama pada setiap daerah. Hadirnya LSM pada bidang pendidikan ini jika semakin banyak dan melebar ke seluruh daerah Indonesia dapat membantu untuk memajukan pendidikan di Indonesia sehingga pendidikan di seluruh daerah baik kota hingga pelosok desa mampu memiliki akses yang sama dan mengentaskan kemiskinan bersama.

Selain menciptakan program-program edukasi anak, PCI juga memberikan edukasi kepada masyarakat umum melalui media sosialnya tentang isu-isu terkait dengan pendidikan, anak, *parenting*, hingga informasi umum, seperti bagaimana menjadi lebih produktif, bagaimana sistem imun bekerja, bagaimana mengajarkan *problem solving* pada anak, mitos dan fakta tentang autisme, peristiwa *sugar rush* pada anak, tips menjaga kesehatan mental selama pandemi, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, PCI juga melaksanakan beberapa webinar yang mendatangkan ahli dalam isu-isu tersebut seperti webinar tentang perlindungan anak melalui edukasi seksual, cara menyelamatkan air tanah, *self-leadership*, dan lain sebagainya.

PROGRAM ONLINE LEARNING ASSISTANCE

Program OLA adalah respons dari adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya dari rumah demi menghindari penyebaran virus. PCI sebagai LSM yang memiliki program luring di sekolah sungai dan sekolah pantai juga harus menyesuaikan dengan kondisi ini salah satu upayanya adalah menghadirkan program OLA. OLA merupakan kelas daring luar sekolah yang dihadirkan oleh PCI yang diharapkan dapat mengurangi *learning loss* pada anak. Dalam program ini, terdapat tepatnya 17 Sekolah Dasar yang bekerja sama dengan PCI dalam program OLA. Lebih lanjut, kelas-kelas dibimbing oleh relawan pengajar yang berjumlah 20 orang dan dibagi dalam 10 kelas dengan berbagai latar belakang, baik usia, pendidikan, maupun tempat tinggal. Program ini menawarkan pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, matematika, serta kebudayaan yang mencakup pelajaran ilmu-ilmu sosial. Mata pelajaran yang diajarkan ini dipilih karena awalnya program ini bertujuan untuk mendampingi peserta didik dalam mengerjakan pekerjaan rumah dalam pembelajaran formal dan kemudian berkembang menambahkan pelajaran kebudayaan agar

memunculkan kesadaran pada peserta didik bahwa tidak semua manusia memiliki latar belakang dan kebudayaan yang sama dan bahwa manusia itu berbeda-beda di seluruh dunia.

Dalam mengelola para sukarelawan, PCI melakukan pembekalan terkait perencanaan pembelajaran, bagaimana menjalankan proyek dengan anak-anak, manajemen kelas, serta *mindful movement* dimana diberikan materi untuk fokus pada masa depan masing-masing serta tidak mengkhawatirkan hal-hal yang sedang dan telah terjadi. Pembekalan dilakukan oleh psikolog profesional untuk membekali bagaimana anak-anak belajar dan bagaimana cara mengajar. Lebih lanjut, manajemen kelas diajarkan oleh tenaga profesional dalam membuat rancangan belajar daring maupun luring bagi anak. Hal ini dilakukan untuk mendampingi sukarelawan. Pembekalan ini dirasakan manfaatnya oleh para sukarelawan untuk memperluas pengetahuan bagaimana cara mengajar dan penerapannya saat pembelajaran di kelas.

KELOMPOK SASARAN PROGRAM *ONLINE LEARNING ASSISTANCE*

OLA memiliki kriteria khusus dalam pemilihan kelompok sasaran karena agar memudahkan penyamaan materi dalam pembelajaran. Kriteria dari kelompok sasaran OLA adalah anak-anak yang sedang menduduki kelas 5 atau 6 Sekolah Dasar yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam waktu dekat namun tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya pembelajaran di luar sekolah. Mereka tergolong anak-anak yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah.

HASIL PENELITIAN

IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN OLEH *PROJECT CHILD* INDONESIA

Sebelum menjadi sebuah LSM, PCI hanya merupakan bentuk kontribusi untuk komunitas lokal, yaitu masyarakat di Kricak Kidul dari dua *founder*. Permasalahan yang diidentifikasi pun awalnya tidak terkait dengan pendidikan tetapi terkait permasalahan ekonomi sehingga kedua *founder* dan masyarakat sepakat untuk bersama-sama menjalankan pelatihan menjahit dengan tujuan untuk berkontribusi bagi perekonomian lokal dalam *fashion* yang berkelanjutan.

Kemudian salah satu *founder* merupakan mahasiswa asing dan menarik perhatian anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Dalam perkembangannya, kegiatan belajar bahasa Inggris menjadi populer di kawasan Kricak Kidul dan para *founder* mulai memikirkan cara melanjutkan pembelajaran ketika *founder* asing telah kembali ke negaranya, yaitu Jerman. Setelah itu, mulai terbentuk suatu perkumpulan sukarela untuk mengajar anak-anak di kawasan Kricak Kidul dan LSM ini terus berkembang baik dari sumber daya manusia, program, hingga cakupan daerahnya hingga sekarang. PCI mulai menyadari bahwa kehadirannya dibutuhkan oleh anak-anak setempat dan menginginkan kontribusinya terus berlanjut.

Kajian ini melihat terdapat pergeseran paradigma pada PCI yang awalnya menggunakan paradigma modernisasi, dimana peningkatan infrastruktur dan kapasitas masyarakat menjadi sentral dalam upaya pengentasan kemiskinan, mereka mengawali program ini dengan membuat workshop menjahit bagi para ibu setempat dengan tujuan mencapai *sustainable fashion* menjadi paradigma reformasi berhasil melihat *problem stream* yang ada dalam masyarakat, yaitu lemahnya pendidikan di Indonesia dan lembaga ini juga telah melakukan aksi nyata dengan mengadakan program-program yang berkaitan dengan pendidikan dalam cakupan

akar rumput. Selain itu, PCI benar-benar menggunakan pendekatan *bottom-up* dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Alih-alih bersikukuh mempertahankan program pengentasan kemiskinan, PCI lebih responsif menjawab ketertarikan masyarakat dampingan untuk meningkatkan kemampuan pendidikan anak-anak.

Lebih lanjut, analisis tentang masalah sosial yang dilakukan oleh PCI juga menggunakan metode serupa, dimana Program Manager PCI menjelaskan bahwa:

“Kami melihat adanya learning loss di pada anak-anak bahkan sebelum pandemi Covid-19 terjadi dan kami ingin setidaknya membantu untuk mengurangi learning loss di akar rumput. Apalagi setelah mengetahui bahwa sebagian besar halangan anak-anak dalam belajar adalah kesusahan dalam memahami penjelasan guru di sekolah.”
(Wawancara, 28 Juni 2022)

Lembaga ini terus ingin membantu anak-anak kelompok rentan dalam pendampingan belajar. Dalam mengondisikan kelas, *Project Child* Indonesia dalam menjalankan program OLA ini tidak semata-mata langsung pelaksanaan program tetapi, pada awal periode OLA lembaga ini membuat survei yang diisi oleh peserta didik terkait preferensi penggunaan *platform*, durasi pembelajaran, hingga subjek pembelajaran yang akan dijalankan.

Tidak berhenti sampai di sana, umpan balik juga diberikan oleh peserta didik untuk program OLA terkait apakah program ini sudah memenuhi ekspektasi peserta didik atau belum dan apa saja hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam program OLA. Sama seperti survei sebelum program dimulai, umpan balik juga diberikan dalam bentuk survei tertulis dalam situs *Google Form*. Hasil dari umpan balik ini kemudian akan menjadi evaluasi dan dasar pelaksanaan program OLA periode berikutnya. Di sisi lain, lembaga ini juga memberikan penilaian performa bagi peserta didik untuk memberikan laporan performa dan progres peserta didik terkait keaktifan, kehadiran, sikap, penugasan materi, catatan, dan kesan pesan relawan pengajar bagi peserta didik dalam satu periode. Pemberian penilaian ini diberikan antara poin sangat baik, baik, cukup baik, hingga kurang baik sesuai dengan catatan dan pengamatan masing-masing relawan pengajar di kelas. Pemberian umpan balik dalam program ini dilaksanakan secara dua arah sehingga kedua belah pihak mendapatkan penilaian dari pihak yang lainnya.

KOLABORASI *PROJECT CHILD* INDONESIA

Dari hasil penelitian, PCI belum memiliki kerja sama resmi bersama pemerintah pusat dan daerah, tetapi lebih memilih bekerja sama dengan sekolah-sekolah dasar yang berada

di bawah naungan pemerintah daerah. Meski demikian, kerja sama antara PCI dan sekolah-sekolah tersebut hanya terbatas pada penawaran program kepada anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah tersebut. Selain itu, PCI berjejaring dengan lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya, khususnya dalam mendapatkan hibah untuk pendanaan. *Partnership and Marketing Manager* mengaku bahwa PCI belum menerima bantuan dari pemerintah Indonesia untuk mendanai program pembelajaran yang berkelanjutan. Satu-satunya bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah pemberian 30 tablet untuk program OLA oleh Kementerian Luar Negeri pada tahun 2021. Program OLA justru mendapatkan hibah pendanaan dari Alumni Grant Scheme oleh Pemerintah Australia (Wawancara, 14 Maret 2022). Selain itu, PCI melalui divisi *Partnership and Marketing* juga aktif secara mandiri dalam mencari dana hibah dari beberapa perusahaan non-pemerintahan dan telah bekerja sama antara lain dengan Gameloft, Nazava Water Filters, Soccer Park, Pameo, XL Axiata, dan lain sebagainya. Pendanaan lain yang dilakukan oleh PCI adalah pelaksanaan *crowdfunding* atau penggalangan dana melalui webinar-webinar yang dilaksanakan secara mandiri serta penjualan berbagai *merchandise* untuk pembiayaan lembaga.

Pilihan PCI untuk bekerja sama dengan pihak-pihak swasta non-pemerintahan disebabkan karena kedaruratan dan kebutuhan untuk merespons kondisi Covid-19 secara cepat melalui program OLA. Hal ini berbeda dengan kolaborasi sebelumnya, antara PCI dengan pemerintah, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola program *drinking water* yang pada dasarnya dilaksanakan di sekolah formal sehingga tercipta kolaborasi formal pula. Dalam kondisi awal (*starting condition*), PCI dalam program OLA belum mengejar kolaborasi formal dengan pemerintah yang berkelanjutan karena program OLA dianggap sebagai respon akan hadirnya pandemi Covid-19 dalam bentuk pengadaan program belajar tidak berbayar.

Untuk pelaksanaan program OLA, PCI memilih berkolaborasi dengan lembaga masyarakat sipil dan mencari relawan dengan mekanisme *open recruitment*, dimana relawan menjadi mitra yang mengimplementasikan program. Di awal perekrutan relawan, PCI berusaha menyeleksi sukarelawan yang sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswa dengan berbagai alasan dan motivasi untuk bergabung, antara lain terdapat 45% relawan memilih alasan untuk mendapatkan pengalaman langsung di lapangan, 20% ingin memberikan dampak baik untuk masyarakat, 20% ingin memberi perhatian lebih untuk lingkungan, serta 15% lainnya

memiliki alasan lain seperti ingin berkontribusi dalam sektor pendidikan untuk anak-anak. Namun, bentuk kolaborasi non-formal tidak dapat dijamin melalui ekspresi motivasi awal. Pada saat implementasi program, terdapat hambatan dimana relawan pengajar tidak sepenuhnya berkomitmen menjalankan tugas. Ditemukan 2 dari 3 relawan pengajar menyatakan bahwa rekan kerja satu kelasnya yang sering kali mangkir sehingga materi yang seharusnya dibawakan oleh dua orang menjadi dibawakan oleh satu orang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam berkolaborasi dengan sesama pihak swasta, PCI juga mengalami kesulitan dalam menjaminkan komitmen dan konsistensi pembagian tugas, terlebih tidak ada kontrak kerja yang jelas antara PCI dengan para relawan.

PROSES MENDESAIN PROGRAM

Di dalam konsep *collaborative governance*, pemerintah dan *stakeholders* duduk bersama untuk merumuskan program dan pembagian tugas yang dituangkan dalam kontrak kerja resmi. Dalam logika *non-formal collaborative government*, pembuatan desain program oleh PCI juga melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah, yaitu peserta didik dengan didukung oleh tenaga profesional dari klinik psikologi Ruang Tumbuh. Sebagai salah satu contoh pemberdayaan *bottom-up*,

PCI melibatkan peserta didik sebagai stakeholder utama, PCI mendesain programnya berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam belajar. Pada awal periode OLA, PCI membuat survei yang diisi oleh peserta didik terkait preferensi penggunaan *platform*, durasi pembelajaran, hingga subjek pembelajaran yang akan dijalankan. Tidak berhenti sampai di sana, umpan balik juga diberikan oleh peserta didik untuk program OLA terkait apakah program ini sudah memenuhi ekspektasi peserta didik atau belum dan apa saja hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam program OLA. Sama seperti survei sebelum program dimulai, umpan balik juga diberikan dalam bentuk survei tertulis dalam situs *Google Form*. Hasil dari umpan balik ini kemudian akan menjadi evaluasi dan dasar pelaksanaan program OLA periode berikutnya.

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, PCI mendesain program untuk memaksimalkan SDM sukarelawan yang mengajar agar menjadi pengajar kelas yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan materi pelajaran serta mengondisikan kelas dengan baik di kelas. Pembekalan terkait perencanaan pembelajaran, strategi menjalankan proyek dengan anak-anak, manajemen kelas, serta *mindful movement* dimana diberikan materi untuk fokus pada masa depan masing-masing serta tidak mengkhawatirkan hal-hal yang sedang dan telah terjadi. Pembekalan dilakukan oleh

psikolog profesional untuk membekali para relawan tentang bagaimana proses anak-anak belajar dan strategi mengajar yang efektif. Lebih lanjut, manajemen kelas diajarkan oleh tenaga profesional dalam membuat rancangan belajar daring maupun luring bagi anak. Hal ini dilakukan untuk mendampingi sukarelawan. Pembekalan ini dirasakan manfaatnya oleh para sukarelawan untuk memperluas pengetahuan bagaimana cara mengajar dan penerapannya saat pembelajaran di kelas.

Meski demikian, desain yang telah dibuat juga memiliki kekurangan dan kendala teknis. PCI mendesain programnya berdasarkan aspirasi peserta didik, namun umpan balik yang disampaikan peserta di tengah pelaksanaan program belum mendapatkan tindak lanjut dari pihak PCI. Salah satu anak yang menjadi target dampingan PCI (wawancara, 6 Juni 2022) mengaku tidak pernah mengikuti kelas karena jadwal yang ditetapkan PCI berlangsung bersamaan dengan kelas di sekolah. Hal ini sudah dikomunikasikan dengan PCI namun tidak ada perubahan jadwal yang dilakukan sehingga beberapa peserta didik tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran OLA selama satu periode. Hal serupa juga diakui oleh salah satu peserta didik lain dimana peserta didik tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada saat bulan puasa karena kegiatan belajar bersamaan

dengan kegiatan mengaji di rumah. Hal ini juga sudah dikomunikasikan dengan pihak PCI namun tidak diberikan solusi sehingga peserta didik tidak bisa mengikuti kegiatan belajar dalam program OLA selama satu bulan. Selain kendala jadwal, salah satu peserta didik mengaku bahwa ia memiliki kesulitan dalam mengakses *platform* yang digunakan. Meski hal ini sudah dikomunikasikan, tidak juga ada upaya dari PCI untuk mencari jalan keluar sehingga peserta didik sering tidak mengikuti pembelajaran (wawancara, 5 Juni 2022). Hal ini menunjukkan adanya kendala internal PCI dalam mengelola dan mengawal program bahwa mereka kurang responsif atas aspirasi anak pada saat program berlangsung, walaupun awalnya, PCI berkomitmen untuk melaksanakan proses *bottom-up* dalam mendesain program.

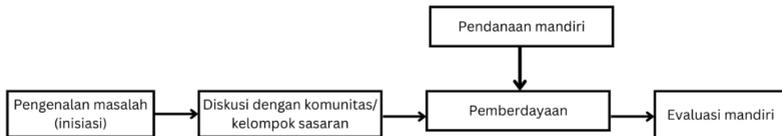
ANALISA

PCI adalah salah satu LSM dan bagian dari masyarakat sipil dengan paradigma reformasi berhasil melihat *problem stream* yang ada dalam masyarakat secara *bottom-up*, yaitu lemahnya kualitas pendidikan di Indonesia dan lembaga ini juga telah melakukan aksi nyata dengan mengadakan program-program yang berkaitan dengan pendidikan dalam cakupan akar rumput salah satunya adalah program OLA sebagai respons dari dampak masuknya Pandemi Covid-19

di Indonesia pada pendidikan. Sistem pemberdayaan *top-down* yang dilakukan oleh negara dengan sistem insitusionalismenya telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dalam peringkat dunia secara umum. Meski demikian, permasalahan pendidikan pada tingkat akar rumput masih membutuhkan perhatian yang lebih dan perhatian yang lebih ini telah diberikan oleh PCI dengan mengadakan pendidikan luar sekolah tidak berbayar bagi anak-anak dari keluarga miskin. Dalam mendukung negara, lembaga ini juga memiliki berbagai tantangan yang masih harus menjadi evaluasi bersama untuk memaksimalkan program yang telah diadakan.

Kajian ini tidak menemukan kolaborasi yang tertulis secara sah antara pemerintah pusat maupun daerah dengan PCI, namun PCI telah berusaha membantu pemerintah dalam mengurangi *learning loss* dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dari pihak pemerintah, terdapat inisiatif pemberian 30 tablet untuk program OLA oleh Kementerian Luar Negeri pada tahun 2021. Namun, tidak ada komitmen dan kontrak kerja jangka panjang antara PCI dan pemerintah. Oleh karena itu, kajian ini menyimpulkan bahwa PCI telah

berkolaborasi secara non-formal dengan pemerintah. Kajian ini menemukan proses *non-formal collaborative governance* memiliki beberapa perbedaan dalam model pemberdayaannya yang dijelaskan dalam bagan di bawah ini:



Sumber: Analisa Peneliti (2022)

Dengan sistem pemberdayaan yang jauh lebih sederhana, terdapat beberapa aspek dalam *collaborative governance* yang tidak dapat ditemui dalam *non-formal collaborative governance*. Dalam kasus PCI, kajian ini menemukan bahwa tanpa adanya kolaborasi dan konsensus dengan pemerintah, PCI memiliki kepedulian dalam isu pendidikan yang sebenarnya juga menjadi *concern* dari pemerintah, namun belum terselesaikan secara menyeluruh, terutama untuk kaum miskin. PCI mengambil inisiatif dan menyusun program untuk mengisi kekurangan ini sehingga walaupun tidak ada perjanjian kerja sama resmi, kedua aktor ini saling mengisi dan dapat berkolaborasi secara non-formal.

PCI mendesain programnya berdasarkan realita yang ada di lapangan atau *bottom-up*, yaitu penetapan kebijakan pembelajaran jarak jauh oleh pemerintah dan membuat program pendampingan belajar daring untuk anak-anak miskin kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Kelompok anak-anak ini dipilih karena PCI melihat kebutuhan anak-anak tersebut untuk belajar dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama namun tidak memiliki daya untuk membayar pembelajaran di luar sekolah. Dalam proses pembuatan programnya pun PCI hanya perlu berdiskusi internal pengurus program dan dengan anak-anak yang mengikuti program terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian proses-proses pemberdayaan, pendanaan, hingga evaluasi juga dilaksanakan sendiri sebagai sebuah lembaga. Meski demikian, program OLA yang didanai oleh pemerintahan Australia kemudian akan memberikan hasil laporan dan evaluasi programnya kepada pemerintah Australia sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan program. Sistem pemberdayaan *bottom-up* yang dicontohkan oleh PCI terbukti merupakan kebijakan yang dibuat tidak hanya berdasarkan apa yang ada di atas meja tetapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Non-formal collaborative governance hadir membawa kekurangan dan kelebihan kepada pemerintah dan kolaborator yang masing-masing dijelaskan pada table di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan *Non-formal Collaborative Governance*

	Kelebihan	Kekurangan
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat bantuan lebih dalam pemberian perhatian terhadap isu-isu sosial • Tidak ada kewajiban dalam pembiayaan kolaborasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rawan dianggap tidak tanggap dalam merespon isu sosial jika dibandingkan dengan kolaborator non-pemerintahan yang akan mengancam legitimasi
Kolaborator	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat lebih cepat merespon isu yang diperhatikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memerlukan upaya lebih dalam pembiayaan program

Dalam *non-formal collaborative governance*, pemerintah mendapatkan bantuan tambahan dari kolaborator-kolaborator non-formal terkait sebuah isu tanpa perlu memberikan pembiayaan. Di sisi lain, rasa keinginan sebuah kelompok untuk merespons sebuah isu juga dapat dilakukan lebih cepat tanpa melewati proses birokrasi yang panjang. Meski demikian, hal ini dapat menyebabkan pemerintah dianggap tidak tanggap akan isu sosial serta kolaborator menjadi perlu untuk mencari sumber pendanaan mandiri.

KESIMPULAN

Pemerintah pusat maupun daerah telah mengakui akan ketertinggalannya mengikuti perubahan-perubahan di masyarakat dan mulai terbuka akan adanya kolaborasi dengan masyarakat, yaitu melalui *collaborative governance*. Meski demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi dengan pemerintah secara formal masih memiliki kendala-kendala. Sebaliknya, terdapat kelompok masyarakat sebagai “kolaborator” pemerintah dengan melihat dan merespons isu yang sama, namun tidak memiliki kontrak kerja resmi dengan pemerintah. Kolaborasi non-formal dengan pemerintah ini memiliki alur yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan kolaborasi yang formal. Meski lebih alurnya lebih sederhana, pemberdayaan *bottom-up* juga memiliki kendala sendiri seperti kendala internal PCI dalam mengelola dan mengawal program.

Salah satu contoh fleksibilitas dari non-formal *collaborative governance* adalah kemampuan PCI untuk mendesain program yang menjawab isu learning loss dalam pendidikan. Di satu sisi, PCI merespons kebijakan pemerintah yang ditetapkan, yaitu kebijakan pembelajaran jarak jauh, mengikuti kurikulum nasional, dan menerapkannya sebagai landasan pembuatan program OLA. Di sisi lain, PCI juga

mendesain program OLA bersama anak-anak peserta didik sehingga program yang terlaksana adalah gabungan dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di akar rumput. Pemerintah dan PCI dalam non-formal collaborative governance ini tidak saling bertukar peran dan saling bergantung layaknya formal collaborative governance. Namun, pemberdayaan ini tetap berlangsung dan saling mengisi walaupun kedua pihak berjalan masing-masing tanpa adanya kontrak kerja resmi yang mengikat antara PCI dengan Pemerintah Indonesia sehingga terbukti bahwa non-formal collaborative government dapat menjadi alternatif kerja sama antara pemerintahan dan non-pemerintahan.

REFERENSI

- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>.
- Ananda, M. R. (2021). Pemanfaatan Media Baru untuk Efektivitas Komunikasi Pembelajaran dalam Masa Wabah Covid-19. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 7 (1), 577-582. doi: <http://dx.doi.org/10.52434/jk.v7i1.1019>.
- Andarningtyas, N. (2022). *Survei: Pengguna internet indonesia naik dari Tahun Ke tahun*. ANTARA News Bangka Belitung. Diakses pada 17 Juli 2022 dari <https://babel.antarane.ws.com/berita/280053/survei-pengguna-internet-indonesia-naik-dari-tahun-ke-tahun#:~:text=Berdasarkan%20survei%20terbaru%20itu%2C%20pengguna,naik%20dibandingkan%20tahun%2Dtahun%20sebelumnya>.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18 (4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.

- Astuti, P. (2022). Mengapa “Learning Loss” Adalah Narasi Yang Bias: Menjawab Panik Hilangnya Capaian belajar di Tengah Pandemi. *The Conversation*. Diakses pada 21 April 2022, dari <https://theconversation.com/mengapa-learning-loss-adalah-narasi-yang-bias-menjawab-panik-hilangnya-capaian-belajar-di-tengah-pandemi-173266>.
- Bappenas. (n.d). 4. Pendidikan Berkualitas. *Bappenas*. Diakses pada 31 Juli 2022 dari <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-4/>.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fitriani, L. dkk. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Pembelajaran Daring Kepada Masyarakat Desa Cibunar di Era Covid-19. *Jurnal PkM MIFTEK*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.33364/miftek/v.2-1.876>.
- Kemendikbudristek. (2021). Kemendikbud Sampaikan capaian tahun 2020 Dan Sasaran Tahun 2021. *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*. Diakses pada 28 Mei 2022 dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/kemendikbud-sampai-kan-capaian-tahun-2020-dan-sasaran-tahun-2021>.
- Kozinets, Robert V. (2010). *Netnography: Doing Ethnographic Research Online*. London: SAGE Publications Ltd.

- Larasati, C. (2021). Survei IDEAS Beberkan Fakta Penurunan Kualitas pendidikan selama PJJ. *medcom.id*. Diakses pada 26 April 2022, dari <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ybJOvLWk-survei-ideas-beberkan-fakta-penurunan-kualitas-pendidikan-selama-pjj>.
- Putra, Y. M. (2020). Nadiem Jelaskan Tiga Fokus perubahan kurikulum Masa Pandemi. *Republika Online*. Diakses pada 26 April 2022, dari <https://www.republika.co.id/berita/qctu2d284/nadiem-jelaskan-tiga-fokus-perubahan-kurikulum-masa-pandemi>.
- Rupita. dkk. (2021). Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 1 (3), 137–149. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/8>.
- Santoso, Djonet. (2018). *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sardjono, M. A & Inoue, M. (2017). Chapter 11 - Collaborative Governance of Forest Resources in Indonesia: Giving Over Managerial Authority to Decision Makers on the Sites. *Journal Redefining Diversity & Dynamics of Natural Resources Management in Asia*, Volume 1, 175–187. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805454-3.00011-6>.

Soetomo. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tilano, F. A & Suwitri, S. (2012). *Collaborative Governance dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang*. Semarang: Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

